

Persekusi *Doxing* sebagai Pola Baru Viktimisasi terhadap Jurnalis di Indonesia

Rintan Puspita Sari

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia

puspitasari.rintan@gmail.com

Abstrak: Bentuk kekerasan terhadap jurnalis tak hanya secara fisik seperti ancaman, tapi juga bisa terjadi secara online. Kekerasan yang terjadi secara online ini dikenal dengan sebutan persekusi *doxing*. Istilah persekusi sendiri selama ini erat dikaitkan dengan bentuk kekerasan yang terjadi secara fisik, merundung orang beramai-ramai. Sementara *doxing*, diketahui sebagai bentuk membuka identitas seseorang untuk kemudian beramai-ramai dihujat, atau tindakan penyelewengan lainnya. Dalam catatannya AJI mengungkap selain kekerasan fisik, ada bentuk kekerasan yang mereka kategorikan sebagai kekerasan baru pada wartawan saat ini. Bentuk kekerasan baru ini dikategorikan oleh AJI sebagai *doxing* atau persekusi secara online. Kasus *doxing* terbaru terjadi pada jurnalis media online, Liputan 6.com, Cakrayuri Nuralam. Peristiwa ini terjadi ketika ia menulis artikel tentang cek fakta untuk verifikasi adanya isu kalau ternyata politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan adalah cucu dari pendiri PKI di Sumatra Barat, Bachtaroedin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola baru viktimisasi terhadap jurnalis di Indonesia dalam hal ini adalah persekusi *doxing*. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber dari kalangan jurnalis ataupun organisasi jurnalis, penelitian berhasil menemukan kesamaan pola terjadinya persekusi *doxing* dengan pola kekerasan fisik yang dialami jurnalis. Yaitu setelah artikel terbit, identitas jurnalis digali kemudian setelah identitas ditemukan, mereka akan jadi sasaran persekusi.

Kata kunci: *Doxing*; Persekusi Online; Jurnalis Media Online

Abstract: Forms of violence against journalists are only physical such as threats, but can also occur online. Violence that occurs online is known as doxing persecution. The term persecution itself has so far taken the form of violence that physically abuses people in groups. Meanwhile, doxing is known as a form of revealing a person's identity to be blasphemed, or other acts of abuse. In its notes, AJI reveals that apart from physical violence, there are other forms of violence that they categorize as new violence against journalists at this time. This new form of violence is categorized by AJI as online doxing or persecution. The latest doxing case occurred in online media journalist, Liputan 6.com, Cakrayuri Nuralam. This incident occurred when he wrote an article about fact checking to raise the issue if it turned out that PDI-P politician Arteria Dahlan was the grandson of the founder of the PKI in West Sumatra, Bachtaroedin. This research was conducted to find out a new pattern of victimization of journalists in Indonesia in this case is doxing persecution. By using the method of exploring several resource persons from among journalists or journalist organizations, we succeeded in finding similarities in the pattern of doxing persecution with the pattern of physical violence experienced by journalists. That

is, after the article is published, the identity of the journalist is dug up and then after the identity is found, they will be the target of persecution.

Keywords: Doxing; Jurnalis; Persekusi; Viktimisasi

Pendahuluan

Dalam catatannya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengungkap selain kekerasan fisik, ada bentuk kekerasan baru yang dialami wartawan tahun 2018-2020 yang dikategorikan oleh AJI sebagai *doxing* atau persekusi secara online (Abdul Manan, 2018). Bentuk kekerasan *doxing* yang dilakukan berupa pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis berita atau komentar yang tak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif (Nurita Dewi, 2019). *Doxing* sebenarnya merupakan istilah yang dulu banyak digunakan oleh peretas dari kata *dropping dox* atau *dropping documents* yaitu membuka identitas seseorang yang sebelumnya anonim (Hona, 2014), termasuk nama resmi, alamat tempat tinggal, identitas penting lain, foto orang terkait atau bahkan keluarganya.

Tiga contoh kasus persekusi *doxing* yang terjadi dan menjadi sorotan, pertama yaitu yang menimpa jurnalis media online Kumparan, Prabarini Kartika yang mendapat teror di media sosialnya usai menulis laporan khusus tentang Habib Rizieq. Kemudian belum lama ini di tahun 2020, media juga dikejutkan dengan ancaman pembunuhan yang menimpa jurnalis detik.com, Isal Mawardi usai menulis tentang Presiden Jokowi yang sedang berkunjung ke salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat terkait new normal. Tak hanya mendapat ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp, Isal juga diserang dengan pesan makanan online, padahal dia tidak memesannya (Lis Yuliawati, 2020). Kasus *doxing* terbaru terjadi pada jurnalis Liputan6.com, Cakrayuri Nuralam. Peristiwa ini terjadi ketika ia menulis artikel tentang cek fakta untuk verifikasi adanya isu kalau politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, cucu dari pendiri PKI di Sumatra Barat (Tim Detik.com, 2020). Kasus *doxing* yang dialami Cakrayuri itu akhirnya dibawa ke jalur hukum oleh pihak media tempat Cakra bekerja, Liputan6.com. Kejadian lain pernah dialami juga oleh editor Kompas.com, Jessi Carina atas artikel tentang Anies Baswedan. Saat itu foto pernikahannya yang dihadiri Anies disebar, dikait-kaitkan dengan artikel yang sedang ditulis, seolah Jessi mendukung kepemimpinan Anies untuk maju hingga kursi presiden (Asnil Bambani, 2020).

Ketiga kasus yang menimpa jurnalis tersebut dapat terjadi karena mereka memproduksi sebuah artikel terkait isu yang tergolong sensitif bagi kalangan tertentu. Konstruksi media terhadap realita yang ada melalui simbol-simbol bahasa akhirnya diterjemahkan sebagai kekerasan simbolik (Gusnita, 2017) bagi kelompok tersebut dan memunculkan tindakan perlawanan berupa persekusi *doxing*. SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) merupakan

organisasi regional yang berfokus pada upaya memerjuangkan hak-hak digital di kawasan Asia Tenggara. SAFEnet menyatakan persekusi sebagai perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis. Sementara itu, Joshua Zatzoff dalam jurnal *Conjuntura Global* (2013) menyebut persekusi memiliki enam unsur kejahatan, yaitu pelaku secara nyata menghilangkan hak-hak dasar orang lain, menargetkan seseorang atau sekelompok orang atas dasar identitas yang berbeda, orang atau kelompok yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan etnik, budaya, agama, gender, orientasi seksual atau alasan lain yang secara universal jelas dilarang, terjadi secara meluas dan sistematis, tindakan yang dilakukan dari pembunuhan hingga perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental.

Tidak dilanjutkannya kasus persekusi *doxing* ke ranah hukum turut berkontribusi dalam menguatnya kultur impunitas, yaitu budaya di mana pelaku kekerasan tidak memiliki rasa takut saat mengulang perbuatannya karena merasa tidak ada proses hukum yang jelas (Leo Batubara, 2018). Kedepannya, dengan tidak adanya tindakan hukum yang jelas pada pelaku persekusi ini membuat media membredeli diri mereka dalam pemberitaan untuk menghindari terjadinya persekusi *doxing*. Sehingga setiap orang jadi merasa memiliki kebebasan untuk mengubah isi berita sesuai keinginan atau kepentingan tertentu. Untuk itu menjadi penting melihat lebih dalam tentang terjadinya *doxing* yang berujung pada persekusi pada jurnalis di era digital seperti sekarang.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam ini dilakukan pada narasumber yang pernah mengalami *doxing*, pemimpin media *online*, tapi juga pada pihak organisasi pers, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers. Selain itu sebagai data pendukung, peneliti juga mengumpulkan kasus-kasus *doxing* lain yang ada dalam pemberitaan media resmi.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori viktimologi kritis Sandra Walklate. Walklate melihat korban kejahatan dengan tiga kunci penting yaitu, *rights*, *citizenship* dan *state*. Viktimologi kritis dikembangkan sebagai upaya untuk melihat realitas hidup korban serta bagaimana struktur sosial membentuk realitas hidup. Dalam teori ini menurut Mawby dan Walklate viktimisasi tidak hanya fokus pada kehidupan korban, tapi juga adanya hubungan rekursif antara lembaga dan struktur diperlukan untuk memahami bagaimana proses historis, budaya dan sosio-ekonomi, serta kekuatan negara (Wolhuter, Olley & Denham, 2009).

Wawancara dilakukan pada informan- informan kunci untuk mengetahui lebih jelas bagaimana terjadinya *doxing* yang dialami oleh jurnalis dalam periode tahun

2018 hingga pertengahan 2020. Wawancara dilakukan pada enam informan, terdiri dari individu yang mengalami *doxing*, pemimpin media, juga dari perwakilan organisasi pers. Selain itu juga terdapat rangkuman dari literatur kasus yang berhasil dikumpulkan baik melalui berita daring ataupun data-data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait kasus *doxing* yang terjadi dalam periode 2018 hingga pertengahan tahun 2020. Terdapat beberapa temuan yang kemudian dikelompokkan peneliti menjadi beberapa bagian: Pemicu terjadinya *doxing*, waktu terjadinya *doxing*, respon saat *doxing* terjadi, respon setelah *doxing* terjadi.

Pemicu Terjadinya *Doxing*

Pada bagian ini menjelaskan tentang pemicu terjadinya *doxing* dan dibagi dalam empat kelompok:

1. Faktor ketertarikan: Ketertarikan di sini adalah minat seseorang yang mendalam baik kepada idola, tokoh masyarakat, tokoh politik dan sebagainya. Ada beberapa contoh kasus *doxing* yang kemudian dimasukkan dalam kelompok faktor ketertarikan ini yaitu terjadinya *doxing* dipicu oleh adanya ketidakpuasan kelompok tertentu yang mengagungkan atau memiliki minat terhadap kelompok atau tokoh atau figur publik, terhadap sebuah pemberitaan. Hal ini terlepas dari kebenaran sebuah artikel. Misalnya pada kasus *doxing* yang terjadi pada Prabarini Kartika dalam artikel liputan khusus berjudul “Menjinakkan Rizieq” (28/5/2018) sebenarnya telah sesuai dengan kaidah jurnalistik yang tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) dimana dalam pasal itu disebutkan “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dalam mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Dalam kasus jurnalis media online Kumparan, Prabarini Kartika (PK) tersebut dia telah membuat kutipan pembicaraan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber, bukan hasil rekayasa. Selain itu, peniadaan kata Habib dalam artikel tersebut yang kemudian dipermasalahakan para pengikut Habib Rizieq, dari penuturan PK sebenarnya merupakan hal yang sudah menjadi peraturan dalam penulisan di Kumparan.com untuk tidak menyertakan gelar Habib. Untuk informasi, Habib merupakan gelar yang digunakan bukan hanya pada orang yang mengaku anak keturunan Nabi tapi juga orang yang memiliki ilmu agama dalam dan luas (Saepudin, Ahmad, 2018). Hal ini tentu saja berlaku untuk semua penyebutan Habib siapapun dalam sebuah artikel. Begitupun dengan pemilihan judul artikel yang tentu saja itu sudah melalui pertimbangan pihak editor sebelum artikel tayang.

Kasus lainnya menimpa jurnalis hiburan Rina Anggraeni (RA) yang mengalami *doxing* karena artikel Kpop berjudul “Kai Keluar dari EXO?” (2/3/2018) artikel

tersebut merupakan artikel terjemahan dari media luar negeri, tujuan menggunakan judul tersebut diakui Rina memang sebagai bentuk *clickbait* agar mengundang niat seseorang untuk membacanya. Penggunaan judul *clickbait* dianggap sebagai bagian dari jurnalistik online sebagai ‘penggoda’ minat seseorang untuk membaca artikel tertentu. Hanya saja ternyata bagi penggemar EXO atau biasa disebut EXO-L, melihat idola mereka diberitakan seperti itu sudah dianggap sebagai suatu hal yang sudah merugikan mereka. Secara psikologis, pemujaan terhadap idola melibatkan pembentukan ikatan emosional antara penggemar dan idola mereka (Yue dan Cheung, 2000), yang menunjukkan bahwa hubungan antara penggemar dan idola mereka memiliki makna emosional. Sampai akhirnya mereka mencari identitas RA, menyerbunya di media sosial, dari Twitter, Instagram pribadi. Bahkan, para penggemar yang tidak menerima artikel tersebut sempat salah menyerang orang dengan nama yang sama di media sosial Twitter, hanya karena kebetulan orang yang salah diserang tersebut adalah penggemar BTS, boyband yang selama ini disebut bersaing ketat dengan EXO. Ketertarikan yang berlebihan dari penggemar EXO membuat mereka bertindak gegabah ketika melihat judul artikel yang ditulis RA. RA mengatakan kebiasaan membaca judul saja tanpa melihat isi, turut memicu seringnya artikel yang dia tulis dihujat.

Contoh lain adalah pada Jessi Carina yang terkena *doxing* usai menulis artikel berjudul “Gubernur DKI Rasa Presiden” dimana artikel tersebut telah dibuat sesuai kaidah jurnalistik dan dengan sumber serta peristiwa yang benar terjadi di lapangan, tapi dianggap tidak tepat bagi kelompok tertentu, padahal artikel tersebut muncul setelah adanya peristiwa nyata yang terjadi di lapangan ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membersihkan sampah sisa banjir di Jakarta Timur 5 Januari 2020. Sama seperti yang ditemukan pada kasus Jessi Carina, kasus Isal Mawardi jurnalis Detik.com yang mendapat ancaman pembunuhan atas artikelnya berjudul “Jokowi Pimpin Pembukaan Sejumlah Mal di Bekasi Siang Ini di Tengah pandemi” dan artikel “Pemkot: Jokowi Siang Ini ke Bekasi, Dalam Rangka Pembukaan Mal” (29/5/2020), membuat Isal jadi sasaran *bully* hingga mendapat ancaman pembunuhan yang dikirim lewat aplikasi pengiriman pesan WhatsApp karena adanya oknum yang menyebarkan gambar tangkap layar dari artikel pertama di akun pendukung Presiden, sehingga artikel tersebut menjadi sasaran *bully*.

2. Faktor topik/ isu berita: Dalam hal ini mengungkap kemungkinan adanya keterkaitan antara topik penulisan artikel berita tertentu yang bisa menjadi pemicu terjadinya *doxing*. Dari beberapa contoh kasus *doxing* yang terjadi, *doxing* bisa menimpa jurnalis di bagian pemberitaan politik, hingga hiburan, dimana *doxing* ini dilakukan karena ideologi, agama, orang atau tokoh tertentu.

Faktor topik atau isu berita bisa dianggap sebagai pemicu jika kembali lagi seperti faktor *interest* atau ketertarikan yang dijelaskan sebelumnya, topik tertentu bisa

menjadi isu berbau negatif dan diartikan negatif oleh kelompok tertentu, berdasar kepentingan mereka atau dianggap merugikan bagi kelompok yang melakukan *doxing*. Namun ada pandangan berbeda terkait satu hal ini, seperti disampaikan Wisnu Nugroho (WN) yang merupakan pemimpin redaksi Kompas.com, berpandangan bahwa *doxing* bisa utamanya terjadi pada artikel politik, tapi bisa juga terjadi pada jurnalis dengan berita lainnya, karena *doxing* itu dilakukan sesuai ketertarikan pelaku *doxing*, dengan tujuan agar argumennya lebih diterima dibanding tulisan yang dibuat jurnalis.

“Tergantung *interest* dari pelaku *doxing*-nya. Kepentingannya apa si pelaku *doxing*. Jadi semua konten bisa jadi sarana atau pintu masuk untuk *doxing*, tergantung kepentingan orang yang men-*doxing* itu mau mencarinya seperti apa?” kata WN.

Dan meskipun tidak sepenuhnya menyebut bahwa ada topik tertentu yang memicu orang melakukan *doxing*, Arif Zulkifli (AZ), Pemimpin redaksi majalah Tempo dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, percaya bahwa *doxing* dilakukan atas dasar ketertarikan orang atau pelaku atas informasi yang dimiliki jurnalis, dan beritanya dianggap membahayakan atau merugikan.

3. Faktor sistem penulisan judul artikel: termasuk dalam kelompok faktor pemicu terjadinya *doxing* adalah hal yang terkait dengan etika jurnalistik itu sendiri. Seperti penggunaan judul yang *clickbait* yang dianggap sebagai hal wajar dalam penulisan sebuah artikel di media online dan tetap dianggap sebagai unsur di dalam jurnalistik itu sendiri. Dalam hal ini seperti pada kasus RA dimana dia memilih judul yang *clickbait* dan digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian diantara banyaknya artikel sejenis. Padahal seharusnya penggunaan *clickbait* juga tidak dibenarkan untuk melakukan *doxing*. Terkait *clickbait* saat ini sudah dinilai sebagai kewajaran dalam penulisan karya jurnalistik online, *clickbait* membantu sebuah artikel terlihat lebih menonjol, lebih menggoda diantara banyaknya pilihan artikel yang mungkin memiliki isi serupa.

“*Clickbait* itu menunjukkan kapasitas si wartawan, tapi kalau dia melakukan *clickbait* bukan berarti bisa di *doxing*. Kalau wartawan menulis berita *clickbait* dan saya dirugikan, yang harus saya lakukan adalah melaporkan ke Dewan Pers, bukan men-*doxing*,” kata AZ.

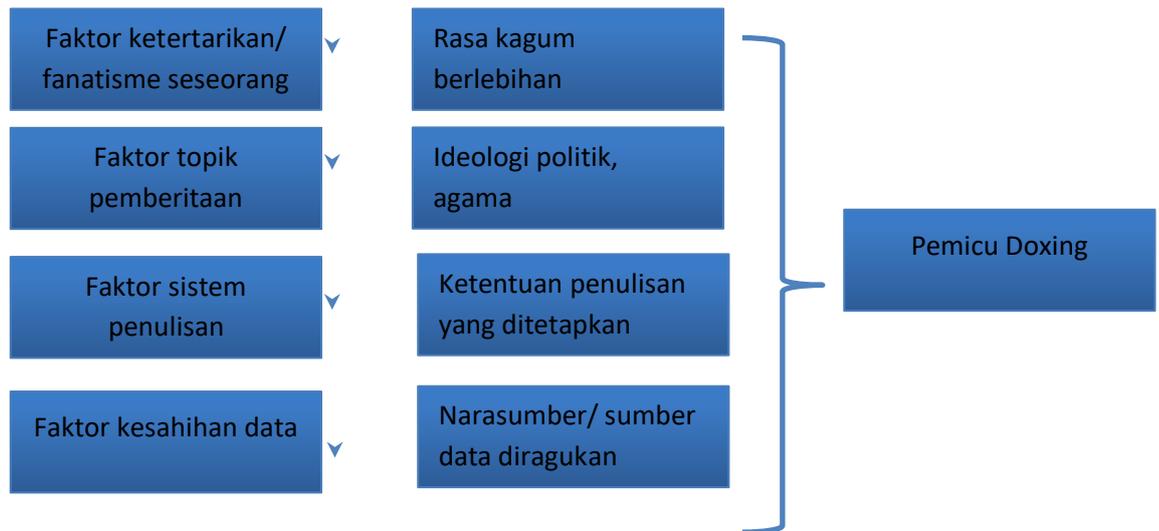
Penulisan judul *clickbait* sekalipun tidak lantas bisa dibenarkan untuk melakukan *doxing* terhadap jurnalis ataupun media. Kalaupun jurnalis melakukan kesalahan, mereka harus dihukum secara etik, karena ada opsi itu. Seperti Kompas.com yang selalu mengingatkan jurnalisnya agar menulis dengan selalu memegang prinsip etika jurnalistik, sehingga kalaupun terjadi protes terhadap tulisan tersebut, selama masih berpegang pada kebenaran,

media ataupun Dewan Pers bisa mengandalkan kebenaran itu sebagai senjata untuk menjawab protes atas suatu kebenaran.

“Kami memberikan arahan kepada semua jurnalis, kami di Kompas.com, untuk secara teguh memegang prinsip *ethic journalism*, sehingga semua persoalan kalau diperkarakan di ranah publik oleh orang-orang, kita memakai pijakan yang sama, walaupun salah, jurnalis itu tidak selalu benar, jurnalis bisa salah, ketika salah dia punya mekanisme untuk koreksi atas kesalahan itu, nah itu yang diwadahi,” kata WN

4. Faktor akurasi data: termasuk dalam kelompok ini adalah faktor di luar kendali jurnalis yang akhirnya menimbulkan terjadinya *doxing*. Misalnya adalah kesalahan ucapan dari narasumber yang sudah dianggap kompeten dan layak untuk dijadikan sebagai narasumber. Kesalahan yang dimaksud, kemudian berdampak pada kesalahan pengutipan dalam berita yang ditulis jurnalis. Sehingga *doxing* terjadi pada jurnalis ataupun ditujukan pada media bersangkutan yang telah salah mengutip. Misalnya saja seperti kasus *doxing* yang akhirnya menimpa jurnalis Detik.com, Isal Mawardi yang karena judul dalam artikelnya “Jokowi Pimpin Pembukaan Sejumlah Mal di Bekasi Siang Ini di Tengah pandemi” dan artikel “Pemkot: Jokowi Siang Ini ke Bekasi, Dalam Rangka Pembukaan Mal” (29/5/2020), padahal Isal menulis artikel tersebut sudah sesuai dengan pernyataan dari Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi berencana membuka mal di Bekasi. Pernyataan itu kemudian diluruskan oleh Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik di kota Bekasi dalam rangka persiapan new normal. Klarifikasi tentang hal tersebut sebenarnya juga sudah dibuat oleh Detik.com. Kasus lain terkait data adalah *doxing* yang terjadi pada jurnalis Detik.com Gibran Maulana Ibrahim yang dipersekusi setelah memuat pernyataan juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Dalam pernyataannya, Novel mengatakan ajakannya pada emak-emak yang ingin masuk surga untuk memilih Prabowo. Akan tetapi dari pemberitaan yang naik dengan judul “Novel Bamukmin: Mau Masuk Surga? Pinta ke Allah, Rasul, Prabowo-Sandi” (12 Oktober 2018), dimana kata minta diganti menjadi pinta yang menurut Novel hal itu merugikannya. Walaupun Detik.com mengaku memiliki rekaman ucapan Novel, dan Novel mengajukan hak jawab, tapi *doxing* tetap terjadi.

Dengan demikian dari hasil wawancara serta analisis wacana, ditemukan beberapa penyebab pemicu terjadinya *doxing* pada jurnalis. Artikel yang ditulis memiliki andil dalam terjadinya *doxing*, dan terdapat empat poin penting dalam hal ini, seperti dirangkum berikut ini:



Gambar 1. Sebab-Sebab Terjadinya *Doxing*

Tabel 1. Terjadinya *Doxing* pada Jurnalis

Pemicu	Kontekstual/ momentum	Modus pelaku
Fanatisme/ rasa ketertarikan pada obyek atau subyek tertentu.	Terjadi ketika suhu politik memanas, seperti momen pemilu, pilkada, isu sosial yang sedang hangat	Mengatasnamakan anggota kelompok tertentu yang fanatik, sembunyi di balik identitas anonim
Topik atau isu berita		Mencari identitas penulis artikel berita dari media sosial (Linkedin, Twitter, Instagram,dll)
Sistem penulisan artikel berita	Isu-isu sensitif, seperti agama, RAS.	Mengumpulkan masa yang sepemahaman dengannya
Akurasi data		

Sumber: Diolah oleh penulis

Waktu Kejadian

Dari beberapa kasus yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2018 hingga pertengahan pertama tahun 2020, gambaran waktu kejadian *doxing* yang bisa

mengalami sebaran merata sepanjang tahun. Misalnya pada kasus Jessi Carina yang terjadi di bulan Januari, kemudian kasus *doxing* lain terjadi di bulan September pada kasus Febriana Firdaus, atau pada kasus Isal Mawardi yang terjadi di bulan Mei. Walaupun terjadi persebaran, ada kesamaan dari beberapa kasus *doxing*, yaitu terjadi ketika ada waktu yang tepat, seperti ketika muncul isu tertentu yang sensitif di masyarakat. Bisa dari demonstrasi, hingga kebijakan pemerintah. Contoh saja dalam konteks kasus *doxing* yang dialami Isal, jurnalis media online Detik.com yang terjadi di masa pandemi corona (Covid-19). Saat itu, aktivitas di masa pandemi memang yang sedang menjadi sorotan masyarakat karena mereka diharuskan untuk membatasi aktivitas di luar rumah atau PSBB. Hal itu seperti diungkapkan oleh AZ kalau *doxing* bisa terjadi tanpa melihat situasi tertentu, tapi mungkin bagi pelaku *doxing*, itu adalah waktu yang tepat. Perbedaan pandangan terkait waktu terjadinya *doxing* ini disampaikan Asnil Bambang (AB), Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menurutnya, *doxing* bisa semakin meningkat ketika suhu politik sedang memanas, seperti pada masa pemilihan presiden, atau ketika ada periode yang membuat pemerintahan mendapat sorotan, sehingga sedikit berita bisa jadi pemicu terjadinya *doxing* yang dilakukan oknum tertentu dengan kepentingannya.

“Kecenderungannya terjadi ketika tensi politik memanas, misal pas pilpres, atau seperti sekarang juga memanas karena banyak yang menyerang kubu pemerintahan. Kita melihat cenderung kesitu,” kata AB.

Dari beberapa kasus yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2018 hingga pertengahan pertama tahun 2020, gambaran waktu kejadian *doxing* yang bisa mengalami sebaran merata sepanjang tahun. Tergantung pada situasi yang sedang dianggap panas saat itu. Misalnya pada kasus Jessi Carina yang terjadi di bulan Januari, ketika itu terjadi Jakarta sedang memanas karena banjir di sejumlah wilayah Jakarta yang sebelumnya bahkan tidak pernah mengalami banjir. Kinerja Gubernur Anies Baswedan kemudian dipertanyakan. Dengan adanya artikel berjudul “Anies Kerja Bakti Saat Hujan di Kelurahan Makasar, Warga: Gubernur DKI Rasa Presiden” (5 Januari 2020) akhirnya mengundang protes sejumlah pihak. Kemudian kasus *doxing* lain terjadi di bulan September pada kasus Febriana Firdaus yang terjadi ketika terjadi konflik di Papua, dan mengabarkan tentang jumlah korban yang menurut kelompok tertentu, jumlah yang dikabarkan Febriana berbeda dari yang disampaikan pemerintah. Demikian halnya pada kasus Isal Mawardi yang terjadi di bulan Mei. Walaupun terjadi persebaran, ada kesamaan dari beberapa kasus *doxing*, yaitu terjadi ketika ada waktu yang tepat, seperti ketika isu tertentu yang sensitif di masyarakat, mulai dari demonstrasi, hingga kebijakan pemerintah di masa pandemi corona (Covid-19) yang sedang menjadi sorotan.

Karena itu, bisa disimpulkan bahwa waktu terjadinya *doxing* umumnya ketika ada suhu politik memanas, tidak harus disaat pemilihan umum berlangsung, tapi juga bisa berjalan sepanjang tahun, tergantung pada isu yang sedang memanas saat itu, dan biasanya isu politik menjadi salah satu pemicu yang paling sering ditemui. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi disaat ada isu sensitif, terkait agama, suku, RAS atau isu sosial, kesehatan.

Pelaku *Doxing*

Dari beberapa kasus yang ada sepanjang tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2020 pelaku *doxing* umumnya bersembunyi dibalik akun-akun yang kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diketahui lebih jelas identitas mereka siapa. Hal ini dijelaskan dalam space transition theory atau teori transisi ruang yang dikembangkan oleh Jaishankar tahun 2008. Dalam teorinya, dijelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat kejahatan yang terjadi di ruang siber berdampak pada ruang fisik. Ada beberapa proposisi dari teori transisi ruang yang dikenalkan oleh Jaishankar yang bisa menjelaskan persekusi *doxing*, yaitu *identity flexibility*, anonimitas di dunia online memberikan keleluasaan orang untuk berperilaku kasar di dunia online. Mereka juga bisa bebas menggunakan akun anonim dan bersembunyi di balik akun-akun palsu untuk menyerang target. Sifat alami dunia siber memungkinkan orang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dan melibatkan server proxy, sehingga membuat ruang siber tempat ideal untuk melakukan kejahatan dan kemudian melarikan diri. Fleksibilitas identitas yang bisa digunakan di siber ini yang kemudian membuat orang lebih mudah melakukan kejahatan. (Man & Sutton, 1998). Dari contoh kasus-kasus yang ada, pelaku *doxing* bisa dimasukkan dalam dua kategori berbeda. Yaitu kelompok fanatik, dan yang disebut sebagai *ad hominem*.

Kelompok Fanatik

Terkait hal ini, AB mengatakan bahwa sejak *doxing* ramai terjadi di masa pemilihan umum tahun 2018, dimana media sosial mulai dilirik sebagai salah satu sarana untuk merebut hati pemilih berusia muda, para kubu menyiapkan pasukan mereka yang memiliki tujuan khusus untuk meraih harapan mereka, mendapat suara dengan mengangkat citra baik dari masing-masing kubu. Para pasukan yang memiliki militansi terhadap kubu tertentu ini yang kemudian ikut menyerang jurnalis di masa pemilihan umum. Fanatisme kelompok terhadap seseorang ini yang kemudian berkembang sebagai perilaku menyerang seseorang yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. meskipun terkadang tidak diketahui juga siapa orang dibalik akun tersebut.

“Pendukung calon ini ada pendukung yang memang berani mati ataupun punya fanatik yang garis keras. Kelompok fanatik ini kemudian berusaha menyerang di media sosial, apalagi waktu itu tren timses (tim sukses) dua kubu membuat para militannya di online, jadi mereka

memang membuat pasukan khusus yang memang bertujuan menggoalkan tujuan politik di media online, baik untuk mengangkat citra maupun membunuh citra lawan. Kelompok ini yang kemudian menyerang teman-teman jurnalis. Sampai sekarang berkembang, masih sih kelompok itu juga yang kemudian mendominasi serangan terhadap teman-teman media online,” kata AB.

Menurut AB, bagi orang yang fanatik, ketika media memberitakan sesuatu yang menurut mereka tidak baik, atau membuka keburukan tokoh atau orang yang mereka hormati, bisa dijadikan alasan untuk mereka melakukan *doxing*.

“Ketika menyerang seseorang, berita itu kemudian mengangkat borok apakah itu *public figure*, pejabat pemerintah, tokoh publik, ketika ini diangkat jurnalis, sementara banyak pengikutnya fanatik ke dia, penggemar atau kelompok fanatik itu tidak mau terima, dan menyerang jurnalisnya. Itu juga pernah ada,” kata AB.

Kelompok ini fanatik ini juga yang kemudian juga dilihat Suwarjono (SW), pemimpin redaksi media online Suara.com dan mantan anggota AJI, sebagai contoh kelompok yang biasa melakukan *doxing* karena merasa dirinya yang paling benar dan tidak menghormati adanya perbedaan, keragaman. Kelompok yang disebut SW sebagai anti keberagaman, baik dari suku, pandangan politik, agama dan keyakinan, termasuk pilihan sosial dan kelamin.

“Banyak kelompok penganut pemahaman tertentu--yang ngotot menjadi kelompok paling benar di Indonesia-- yang merasa maha benar-- ketika dikritik tidak terima dan biasa melakukan *doxing*,” kata SW.

Perkara militansi dan fanatik ini yang kemudian kembali muncul dalam peristiwa *doxing* lainnya, walaupun akhirnya tidak pernah diketahui siapa pelaku yang bersembunyi di balik akun pelaku *doxing*. Seperti pada kasus PK yang mengatakan bahwa pelaku *doxing* terhadap dirinya mengatasnamakan dari kelompok Habib Rizieq, tapi ketika pihak tersebut dikonfrontir mereka mengatakan bahwa pemilik akun-akun tersebut bukan berasal dari kelompok mereka. Hanya saja ketika dilakukan upaya mediasi perdamaian, *doxing* sudah berhenti terjadi. Terkait pelaku fanatik ini, juga terjadi tidak hanya pada tokoh-tokoh politik, karena bisa juga terjadi pada sosok selebriti dengan penggemar fanatik. Contoh pada kasus RA dimana penggemar boyband EXO yang dikenal begitu memuji idolanya, tak terima ketika melihat kabar yang dianggap buruk dari sudut pandang mereka. Mereka bisa dengan bebas menyerang seseorang di balik akun anonim.

Ad Hominem

Istilah *ad hominem* ini disematkan pada pelaku *doxing* oleh WN dan AZ selaku pemimpin redaksi dari dua media online ternama. *Ad hominem* dipercaya WN dan AZ sebagai cara yang dipilih orang yang kalah dalam berargumentasi dengan menyerang individu dalam hal ini reporter yang menulis berita.

“Kenapa mereka melakukan *doxing*, mereka tidak menemukan kesalahan yang tadinya mereka tuduhkan dari artikel yang tadinya mereka anggap tidak memuaskan. Ketika mereka tidak menemukan celah untuk kemudian melanjutkan ketidakpuasannya, yang dilakukan adalah *doxing*. Secara klasik, logika dilakukan *argumentum ad hominem*, kl kita berdebat, kalah argumen maka yang dilakukan bukan menjatuhkan argumen tapi orang yang punya argumen itu,” kata WN.

Respon Korban Terhadap Terjadinya *Doxing*

Pada bagian ini menjelaskan tentang temuan terkait reaksi individu yaitu jurnalis ketika mereka mengetahui telah terjadi *doxing* pada diri mereka. Respon setiap jurnalis satu dan lainnya tidak sama. Ada yang menganggap santai, ada juga yang panik dan takut. PK contoh pertama, dalam kasus *doxing* yang diterimanya tak lama setelah artikel naik, PK awalnya tak ambil pusing melihat banyak Direct message (DM) masuk ke akun Instagram-nya, sampai kemudian jumlah DM terus berlipat hanya dalam hitungan jam, PK mulai panik, terlebih di dalam pesan tersebut tidak hanya bernada ancaman, tapi juga pelecehan verbal dengan menyebut bagian organ intim wanita. Perasaan risih, takut, apalagi ada yang mengunggah akun LinkedIn dan mengaku mengetahui keberadaan rumahnya, PK akhirnya memberitahu atasannya, yang kemudian oleh pihak kantor langsung diberikan perlindungan, mulai dari mengizinkan pulang lebih cepat, menawarkan untuk menjaga rumah, memperketat penjagaan di kantor, mengizinkan dan membiayai PK untuk keluar kota sementara waktu, hingga opsi untuk melaporkan ancaman yang dikirim lewat DM itu ke pihak berwajib.

“Aku awalnya cuekin, tapi lama-lama makin banyak DM masuk, itu pas lagi rapat, aku takut, karena isinya udah mengancam, nyebut organ seksual, serem deh. Aku akhirnya tunjukkan ke atasanku, kebetulan dia duduk di samping aku pas lagi rapat. Akhirnya aku disuruh pulang aja, daripada di kantor juga enggak konsen,” kata PK (Wawancara 31 Mei 2020).

Tak jauh berbeda cerita PK dengan RA. Fanatisme penggemar terhadap idolanya di dunia Kpop memang tak bisa dianggap remeh, dengan fanbase yang besar, mereka bahkan bisa juga menggeser trending topic Twitter dengan kekuatan fanbase. Mencari akun Instagram, Twitter, Facebook milik RA merupakan hal yang sederhana, dalam waktu singkat mereka bisa menemukannya, meskipun pada awalnya mereka sempat salah sasaran ketika menghujat akun Twitter dengan nama

sama, hanya karena akun tersebut dikenali sebagai Army (penggemar BTS). Tapi pada akhirnya mereka bisa menemukan akun media sosial RA, dan dalam hitungan kurang dari 4 jam setelah artikel naik, RA mendapat ratusan DM bernada ancaman.

Reaksi menghentikan langsung aktivitas yang berhubungan dengan media sosial atau memblokir juga dilakukan oleh Febriana Firdaus yang langsung memilih untuk menghentikan penulisan artikel tentang Papua, demikian halnya dengan Isal dari Detik.com yang kemudian memilih memblokir nomor yang mengirim pesan ancaman akan membunuhnya. Bahkan hingga saat ini jurnalis Detik.com tersebut sengaja ‘disembunyikan’ agar tidak menjadi target lagi. Sementara pada Jessi Carina lebih menganggap apa yang dia alami sebagai bagian dari risiko pekerjaan. Selain Jessi, reaksi serupa yang menganggap *doxing* ini sebagai risiko pekerjaan terjadi pada jurnalis Associated Press. Meskipun demikian, Niniek tak surut langkahnya untuk tetap menulis karena hal serupa juga pernah terjadi padanya.

“Dulu waktu Pilkada DKI juga pernah dapat ancaman seperti ini... tapi yang kali ini memang keterlaluhan karena memasang foto-foto kami dan alamat kantor, serta mengajak orang menghakimi saya. Akibatnya follower akun itu termakan fitnah keji,” kata Niniek (VOA Indonesia, 25 Mei 2019).

Respon Setelah Terjadi *Doxing*

Media: dalam kelompok ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh media ketika terjadi *doxing* terhadap jurnalis mereka. Mulai dari mengamankan jurnalis, hingga ada yang melakukan penyelidikan mandiri. Memilih untuk mengamankan jurnalis ini dalam artian menjauhkan jurnalis, melarang untuk menggunakan media sosial sementara waktu, hingga mengizinkan jurnalis untuk ambil libur. Tindakan-tindakan ini dipilih oleh beberapa media, seperti Detik.com dalam kasus Isal yang menjadi sulit untuk dihubungi bahkan oleh sesama jurnalis. Atau yang terjadi pada PK yang langsung mendapat perintah dari kantor untuk bersembunyi dulu hingga ke luar kota dan dibiayai penuh oleh kantor, pihak kantor juga datang ke rumah PK untuk menawarkan beberapa opsi perlindungan, termasuk melapor ke pihak berwajib. Demikian halnya dengan Kompas.com yang salah satu jurnalisnya mengalami *doxing*. WN menyebut Kompas.com memiliki beberapa tindakan pada dua kasus *doxing* yang pernah terjadi pada mereka. Perlindungan dari kantor media juga dilakukan pada kasus Niniek Muji Karmini, dari Associated Press, dikutip dari VOA Indonesia, bahwa Associated Press telah meningkatkan keamanan seluruh fasilitas kantor dan khususnya untuk wartawan lapangan seperti dirinya. Untuk sementara waktu, Niniek menambahkan, dia juga dilarang melakukan peliputan lapangan yang berhubungan dengan kerusuhan atau terorisme. Mengenai perlindungan kantor rupanya juga menjadi pedoman yang sama di media lain, seperti dikatakan SW bahwa sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melindungi jurnalis, karena mereka terkena *doxing* sebagai bagian dari pekerjaan.

“Kewajiban kantor perusahaan media melindungi jurnalis dan mengambil alih tanggungjawab. Perusahaan media akan melakukan pembelaan sepenuhnya, karena jurnalis mendapat *doxing* atas pekerjaannya. Sedang bertugas sebagai jurnalis. Terhadap keselamatan jurnalis, perusahaan media bisa melakukan tindakan mengungsikan sementara jurnalis bila ada ancaman. Dan tidak memberikan beban pekerjaan selama menjadi korban *doxing*,” kata SW.

Organisasi pers: termasuk dalam perlindungan eksternal ini ada dua bagian, yaitu perlindungan dari sisi produk jurnalistik, yang bisa dilakukan oleh organisasi pers seperti Dewan Pers ataupun AJI. Juga dari segi perlindungan secara hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, yang bisa menangani jika terjadi ancaman yang dinilai sudah membahayakan jiwa. Namun disayangkan organisasi pers seperti AJI, banyak media yang dinilai lebih memilih untuk tidak membawa kasus *doxing* ke ranah hukum dengan berbagai pertimbangan. Bahkan menurut AZ, Dewan Pers tidak memiliki catatan adanya laporan media yang membawa kasus *doxing* ke ranah hukum, atau bahkan membawanya ke Dewan Pers. Hal ini seperti juga disampaikan oleh AB ketika melihat keputusan media menutup kasus *doxing* dengan begitu saja.

“Untuk perlindungan, Kumparan sih oke, cuma Kumparan tidak melakukan pressure untuk penegakan hukum terhadap jurnalisnya. Perilaku permisif yang membuat kita bingung. Karena pola pikir pemilik atau petinggi media yang merasa ya sudahlah damai-damai saja, masih banyak berita lain yang mesti dikejar, bikin polemik nanti enggak kerja-kerja,” kata AB (wawancara 10 Juni 2020).

Dari tindakan dalam menghadapi *doxing*, perusahaan media cenderung memilih bungkam dan lebih fokus pada keselamatan jurnalis mereka, serta cara penyelesaian yang dianggap sebagai yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terlepas dari adanya kesamaan dalam pola kekerasan terhadap jurnalis, di era digital seperti sekarang kekerasan tersebut memiliki pola baru yang kemudian disebut sebagai persekusi *doxing*. Terdapat pola tertentu yang akhirnya membuat persekusi *doxing* ini menjadi suatu kejadian berulang. Dari pola yang ditemukan setelah merangkum beberapa peristiwa *doxing* dalam rentang periode tahun 2018 hingga Mei 2020, benar ada satu kesamaan yang kemudian bisa ditemukan pola mengapa *doxing* bisa terjadi. Yaitu adanya unsur pemicu terjadinya *doxing*, yang biasanya berawal dari artikel yang diunggah di media tertentu, kemudian timbul ketidakpuasan atas pemberitaan tersebut. Atau disebabkan oleh adanya ketertarikan seseorang atau kelompok tertentu terhadap tokoh atau figur yang dikagumi. Pola yang ditemukan dalam penelitian juga menunjukkan bahwa pemicu terjadinya *doxing* pada jurnalis tetap pada masalah

artikel yang ditulis. Ini menjadi viktimisasi baru, di mana pada zaman dulu, ketidakpuasan atau kritik terhadap artikel tertentu dituangkan lewat ancaman secara fisik atau nyata.

Isu sosial, politik, agama, hingga masalah jenis kelamin bisa jadi topik sensitif yang mudah memancing suatu kelompok untuk mengungkap ketidaksetujuan mereka atas karya jurnalistik yang sebenarnya dibuat berdasar atas fakta yang ada di lapangan. Dan *doxing* dianggap sebagai hal yang mudah untuk dilakukan karena pelaku bisa sembunyi dibalik akun-akun anonim. Oleh karena itu, penting juga bagi media atau jurnalis menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menulis atau memproduksi artikel sebelum ditayangkan. Media, bisa melakukan upaya-upaya pencegahan yang bisa meminimalisir terjadinya persekusi *doxing*. Misalnya dengan melakukan uji kompetensi wartawan secara rutin, selain itu bisa juga dilakukan pelatihan jurnalistik mandiri di kantor masing-masing secara berkala untuk menyegarkan kembali ingatan jurnalis akan kode etik jurnalistik. Mengingat untuk selalu menerapkan prinsip verifikasi narasumber atau sumber berita.

Daftar Pustaka

- Al Farisi, Salman (2018). Tindak Pidana Persekusi Terhadap Pelaku Penghina Ulama. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Allcott, Hunt, Matthew Gentskow (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspective*. Vol.31 Issue: 2/2017.
- Batubara, Leo. (2019, Februari 12). *Revisi UU Pers atau Hak Konstitusional?*. *Dewan Pers*. Diakses dari https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/47/Revisi_UU_Pers_atau_Hak_Konstitusional?
- Beam, Randal A. & Meg Spratt (2009). Managing Vulnerability. *Journal of Journalism practice*, 3:4, 421-438, DOI:10.1080/17512780902798653.
- Bond, F. Fraser (1964). *An Introduction to Journalism*. New York: The Macmillan Company.
- Carrabine, et.al (2009). *Criminology a Sociological Introduction*. London: Routledge
- Chen, Qiqi, Chan, Ko Ling, and Anne Shann Yue Cheung (2018). Doxing Victimization and Emotional Problems among Secondary School Students in Hong Kong. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15,2665;doi:10.3390.

- Cheung, C. K., and Yue, X. D. (2012). Idol worship as compensation for parental absence. *Int. J. Adolesc. Youth* 17, 35–46. doi: 10.1080/02673843.2011.649399
- Citron, Danielle Keats, dan Neil M. Richards (2018), Four Principles for Digital Expression (You Won't Believe #3!). www.scholarchip.law.bu.edu.
- CPJ. (2019, Maret 8). *South African journalist doxxed by Economic Freedom Fighters Leader, Threatened*. Diakses dari <https://cpj.org/2019/03/south-african-journalist-doxxed-by-economic-freedom.php>
- Crawford, Adam (1998). *Crime Prevention & Community Safety : Politics, Policies & Practices*.
- Darma, Made (1996). *Kriminologi Edisi 1, Cetakan 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Douglas, David M (2016). Doxing: a conceptual analysis, DOI 10.1007/s10676-016-9406-0.
- Duilah, Irham. (2018, Desember 31). *Catatan Akhir Tahun 2018: Jurnalis Dibayangi*
- Effendi, A. Masyhur, Evandri, Taufani Sukmana (2007). *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial dan politik & proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM*. Ghalia Indonesia.
- Garini, Tsana, Abie Besman (2018). Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Online. *Jurnal Komunikasi* Vol. 11(1), Juni 2018.
- Gusnita, C. (2017). Kekerasan Simbolik Berita Kriminal di Media Massa. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 1(1), 71-81.
- Gusnita, Chazizah (2019). Fenomena Anak sebagai Pelaku Persekusi di Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol.3, No 1, April 2019.
- Hancock B., Windridge K., and Ockleford E (2009). *An Introduction to Qualitative Research*. Birmingham
- Hansen, Isabella, Darren J. Lim (2019). *Doxing democracy: influencing elections via cyber voter interference*. *Contemporary Politics*. Vol 25, Issue: 2.
- International Federation of Journalists and South East Journalist Unions (2018). *Underneath the Autocrats*.
- Irfani, Faisal. (2020, Maret 3). *Pembunuhan Wartawan Udin adalah Bukti Keberingasan Orde Baru*. Diakses dari <https://tirto.id/pembunuhan-wartawan-udin-adalah-bukti-keberingasan-orde-baru-dal6>
- K. Jaishankar (2007). Establishing a Theory of Cyber Crime. *International Journal of Cyber Criminology*, Vol.1 Issue 2 July 2007.

- Kanistren, Aragani Timur (2018). "Save Journalist" Penggunaan Tokoh Fantasi Jurnalis Televisi dengan Teknik Animasi Motion Graphic. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Karmen, Andrew (2007). *Crime Victims : An Introduction to Victimology*. USA: Cengage Learning
- Kuosmanen, J (2014). What's so special about persecution? Ethical Theory and Moral Practice, Vol.17 No 1, 129
- M.A, Ibrahim, (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional..
- Mentong, Chen, Anne Shann Yue Cheung, Ko Ling Chan (2019). Doxing: What Adolescent Look for and Their Intentions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2019, 16, 218; doi:10.3390/ijerph16020218.
- Mustofa, Muhammad (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama
- Nahria, Alimuddin Unde (2011). Kode Etik Jurnalistik dan Sensor Diri di Kalangan Wartawan Pasca Orde Baru di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Vo.1, No 2 April-Juni 2011.
- Nugroho, Bekti, Samsuri (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers
- Nurhajati, Lestari dan Wijayanto, Xenia Angelica (2018). Peran LBH Pers Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia. *Jurnal Dewan Pers*, Vol.17 Juli 2018, 47-53.
- Nurita, Dewi. *AJI: Kekerasan dan Persekusi Wartawan di 2018 Tinggi*. Tempo 31 Desember 2018. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1160304/aji-kekerasan-dan-persekusi-wartawan-di-2018-tinggi/full&view=ok>
- Nurlatifah, Mufti.(2018). Posisi Undang-undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital. *Profetik Jurnal Komunikasi*, Vol.11/No.01/April 2018, 71-85
- Ospina, Sonia (2004). *Qualitative Research*. London: Sage Publication
- Persekusi dan Kekerasan Fisik*. Diakses dari <https://aji.or.id/read/press-release/887/catatan-akhir-tahun-2018-jurnalis-dibayangi-persekusi-dan-kekerasan-fisik.html>
- Prastiyo, Angga (2018). Pemaknaan Objektivikasi Perempuan Sebagai Hasil Doxing Pada Akun Instagram Undip.Cantik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Putra, Lati M.T (2018). Perbuatan Persekusi dari Sudut Pandang KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VII/No.2/April/2018.

- Saepudin, Ahmad (2018). Habib dan Pengembangan Keagamaan Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Studi Agama-Agama*. ISSN 2089-8835. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Sahrin, Nori (2019). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Berita Hasil Liputan Wartawan. *Jurnal Teknologi Informasi* Vo.3, No.2. Desember 2019.
- Setiawan, Iwan, S.H., M.H.(2017). Kajian Yuridis Terhadap Persekusi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5/No.2/September/2017.
- Snyder, Peter, et.all. *Fifteen Minutes of Unwantes Fame: Detecting and Characterizing Doxing*. <https://doi.org/10.1145/3131365.3131385>
- Snyder, Peter, et.all. "Fifteen Minutes of Unwantes Fame: Detecting and Characterizing Doxing". <https://doi.org/10.1145/3131365.3131385>
- Suhandang, Kustadi (2004). *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- Syeban, Salim F.T.B (2017). Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, Vol 5, No 9(2017).
- Tim Detik.com. (September, 2020 12). *Jurnalisnya jadi Korban Doxing, Liputan6.com Akan Tempuh Jalur Hukum*. Diakses tanggal 24 September 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-5170198/jurnalisnya-jadi-korban-doxing-liputan6com-akan-tempuh-jalur-hukum>
- Trottier, Daniel (2019). *Denunciation and Doxing: Towards a Conceptual Model of Digital Vigilantism*. Global Crime. United Kingdom: Routledge
- Wahyudin (2016). *Pengantar Jurnalistik Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan*. Makasar.
- Wilcox, Pamela (2015). *Routine Activity, Criminal Opportunities, Crime and Crime Prevention*. USA: Elsevier.
- Wolhuter, Lorraine,et.al (2009). *Victimology : Victimisation and Victim's Rights*. New York: Routledge
- Zatcoff, Joshua (2013). The International Crime of Persecution. *Conjuntura Global, Curitiba*, Vol. 2, n.3.